

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Haris, 2018, Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Jupiter, Semarang
- Desna Aromatica, 2021, Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Administrasi Publik Sebuah Kajian Tentang Kelembagaan, CV. Amerta Media, Jawa Barat
- Dr.Saifuddin Yunus, dkk., 2021, Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu, Bandara Publishing.
- Hendrawati Hamin, 2018, Manajemen Pemberdayaan masyarakat, Dela Macca Makasar.
- Kamal Hidjaz, 2019, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , (Makassar: Pustaka refleksi.
- Lexy J Meleong, 2019, metode penelitian kualitatif, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya.
- Matuankotta, J. K., 2020. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat.
- Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. , 2023. Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah. Nuansa Cendekia
- Sugiyono, 2023, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta cv.
- Sunarso, H. S., 2019, Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Sinar Grafika.
- Syad Afandi, dkk, 2022, Pengantar Teori Pembangunan, cv. Bintang Semesta Media, Yogyakarta..
- Tambani Rusyam, 2018, Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa, Bumi Aksara, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2020, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarlota Singeri, 2022, Administrasi dan Menejemen Sekolah, Cv. Azka Pustaka, Pasaman Barat.
- Muhammad Muiz, 2021, Tata Kelola Pemerintah Desa, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kuncoro, M, 2018, Perencanaan Pembangunan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Bupati pasaman Barat nomer 48 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Nagari

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari

C. Skripsi/Jurnal

Adi Suprayitno and Wahid Wahyudi, 2020, Pendidikan Karakter Di Era Milenial (Deepublish).

Akib, M., 2012. Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah. Jurnal Media Hukum.

Am, T. A., 2024, Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 1, No. 1.

Arip Rahman Sudrajat, Perilaku Organisasi Sebagai Suatu Konsep & Analisis (Nilacakra, 2021).

Aulia Rahmat, 2019 , "Civil Society Nagari Minangkabau: Restrukturisasi Adat Dalam Lintasan Kebijakan', Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan Dan Kependidikan, vol 8 no 1 Arlin Kandati, 2020, Perencanaan Pembangunan Melalui Musrembang Di Desa Batumbalango, Vol. 2 No.3, Prodi Il. Pemerintahan

- Dian Hadana Putra, 2020, "Peranan Wali Nagari Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat", Universitas Medan Area.
- Dumanaw, T. 2015. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Retribusi Pariwisata Di Kabupaten Minahasa Utara. *Lex Et Societatis*, vol 3 no 8.
- Fauziah, N. 2023. Pemetaan Mikrozonasi Kerusakan Bangunan Pasca Bencana Gempa Bumi di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat, Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang.
- ebriyanti, S., & Halmawati, H. 2020. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi Pada Nagari Di Kabupaten Agam). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, vol 2 no 1.
- Finayanti, R. Y. Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan Melalui Partisipasi Masyarakat Secara Sukarela, Doctoral dissertation.
- Hermawati, H., Eliza, E., & Utami, S. , 2020, Manajemen Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di KeNagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping. *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol 11 no 1.
- Hutasoit, P. L. (2015). Perencanaan Dan Pengawasan Biaya Kontruksi Dalam Meningkatkan Efisiensi Kegiatan Operasional Pada Pt. Cakra Buana Megah. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2).
- Maemunah, M. 2018. Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, vol 6 no 1.
- Moonti, R. M. 2017. Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol 20 no 2.
- Susana, D., Afrizal, A., & Najmudin, N., 2020, Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Nagari Siaga Aktif Di Kabupaten Lima

Puluh Kota. Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, vol 14 no 1.

Tengku Fahrul Gafar, dkk., 2023, "Dominasi Peran Wali Nagari Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BumNagari)", Jurnal Cakrawala Ilmiah, vol 2. no 11.